

# **Dari Tertinggal menuju Terdepan Strategi Revolusioner Investasi untuk Papua dan Daerah Otonomi Baru dalam Akselerasi Investasi DOB**

**Alya Zulhanifa<sup>1</sup>, Anggun Weldiana Putri<sup>2</sup>, Ririn Fauzia Rahma<sup>3</sup>**

Sistem Informasi, Universitas Andalas

Sistem Informasi, Universitas Andalas

Sistem Informasi, Universitas Andalas



## **ABSTRAK**

Pembangunan ekonomi di Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB) menghadapi tantangan kompleks, mulai dari infrastruktur yang terbatas, ketimpangan sosial, hingga rendahnya daya tarik investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi revolusioner guna mempercepat pertumbuhan investasi di wilayah tersebut, sehingga dapat mengubah paradigma dari daerah tertinggal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, analisis kebijakan, dan studi komparatif model investasi di wilayah serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan holistik meliputi deregulasi kebijakan, insentif fiskal, penguatan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kolaborasi publik-swasta dapat menjadi kunci akselerasi investasi. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan mencakup pembentukan badan investasi khusus, skema pendanaan inovatif, dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah. Dengan implementasi strategi ini, Papua dan DOB memiliki potensi untuk menjadi destinasi investasi unggulan, mendorong pemerataan pembangunan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi nasional.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan wilayah potensial dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari mineral, hutan, hingga keanekaragaman hayati. Namun, ironisnya, wilayah ini masih tertinggal dalam pembangunan ekonomi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua masih mencapai 26,8%, jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,4%. Selain itu, kontribusi Papua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional

hanya sekitar 2%, padahal wilayah ini menyimpan 35% cadangan mineral Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan pembangunan yang sangat lebar antara Papua dan DOB dengan wilayah lain di Indonesia.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan melalui pendekatan yang lebih terfokus dan lokal. Namun, pemekaran wilayah ini tidak serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan jika tidak dibarengi dengan strategi investasi yang revolusioner. Tantangan utama yang dihadapi meliputi infrastruktur yang tidak memadai, birokrasi yang rumit, dan persepsi risiko tinggi dari investor akibat konflik sosial dan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, indeks kemudahan berusaha di Papua menempati peringkat terendah di Indonesia menurut laporan Bank Dunia (2022).

Selama ini, kebijakan otonomi khusus dan dana desentralisasi telah dijalankan, tetapi dampaknya belum optimal. Otonomi Khusus Papua yang dimulai tahun 2001 belum mampu mengatasi ketertinggalan secara signifikan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan. Di sisi lain, potensi investasi di sektor pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan masih sangat besar tetapi belum tergarap maksimal. Misalnya, potensi pariwisata di Raja Ampat atau lahan pertanian yang subur di Papua belum dikelola dengan baik untuk menarik investasi skala besar.

Oleh karena itu, diperlukan strategi revolusioner yang tidak hanya berfokus pada peningkatan angka investasi, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan inklusivitas. Strategi ini harus mencakup reformasi regulasi, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Contohnya, penyederhanaan perizinan melalui sistem online, pemberian insentif fiskal bagi investor, serta pelibatan masyarakat adat dalam proyek-proyek investasi untuk mengurangi konflik sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan investasi di Papua dan DOB serta merumuskan strategi yang dapat mengubah wilayah ini dari daerah tertinggal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk mengakselerasi pembangunan di Papua dan DOB.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini dibuat secara rinci dan jelas berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah, sehingga masalah yang timbul dapat dijawab dengan benar. Berdasarkan penelitian penulis, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana strategi revolusioner investasi yang efektif dapat dirancang untuk mengubah Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB) dari wilayah tertinggal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, dengan memanfaatkan potensi lokal dan mengatasi hambatan struktural, sehingga mampu menggantikan ketergantungan pada pendekatan investasi konvensional yang selama ini kurang berhasil?”

### **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan strategi revolusioner investasi yang efektif untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB), dengan fokus pada pemanfaatan potensi lokal dan mengatasi hambatan struktural, sehingga dapat menjadi alternatif solusi dari pendekatan investasi konvensional yang selama ini kurang berhasil.

### **1.4 Manfaat**

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis sebagai kontribusi dalam pengembangan strategi investasi di daerah tertinggal, khususnya Papua dan DOB. Secara praktis, hasilnya memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan panduan bagi investor. Pada sisi sosial, penelitian ini mendorong pemberdayaan masyarakat lokal dan inklusi sosial. Secara ekonomi, strategi yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan menjadikan Papua serta DOB sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

## **BAB II STUDI LITERATUR**

Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia merupakan wilayah yang kerap disebut dalam konteks ketimpangan pembangunan. Sebagai kawasan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Papua masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kebijakan yang menghambat laju investasinya. Oleh karena itu, berbagai strategi revolusioner dalam kerangka percepatan investasi menjadi sorotan penting dalam upaya mendorong transformasi wilayah ini dari tertinggal menjadi terdepan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Ariyadi dan I Putu Danny Hadi Kusuma menyoroti bagaimana implementasi Dana Otonomi Khusus Papua dipengaruhi oleh dinamika kelembagaan pusat (Perbendaharaan et al., 2024). Dalam pendekatan institusional, peran dominan pemerintah pusat cenderung menyebabkan homogenisasi kebijakan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan lokal Papua. Penelitian ini memberikan pemahaman awal bahwa strategi investasi di Papua perlu mempertimbangkan struktur relasi antara pusat dan daerah yang lebih setara, serta membuka ruang partisipasi lokal secara nyata.

Sementara itu, Suriadi menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan dana Otsus untuk pembangunan di Papua. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa penguatan tata kelola, transparansi anggaran, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan menjadi aspek mendasar dalam mendorong efektivitas investasi daerah. (Suriadi et al., 2024) Temuan ini memberikan relevansi praktis bahwa kebijakan investasi tidak semata soal kucuran modal, tetapi juga menyangkut mekanisme pengelolaan yang demokratis dan inklusif.

Dalam konteks penerimaan terhadap Daerah Otonomi Baru, Tabumi melalui studinya menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran di Papua belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-

prinsip demokrasi partisipatif (Tabuni et al., 2023). Pemekaran dianggap belum menjawab kebutuhan riil masyarakat Papua dan berisiko memperbesar konflik horizontal apabila tidak dikelola secara bijak. Hal ini menekankan pentingnya desain strategi investasi yang selaras dengan kearifan lokal serta mampu memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat adat.

Selanjutnya, Purwadi dan Jamaluddin mengangkat aspek efisiensi investasi di Papua melalui analisis ICOR (Incremental Capital Output Ratio) (Purwadi & Jamaluddin, 2020). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun investasi tumbuh, efisiensinya masih rendah akibat hambatan seperti hak ulayat, infrastruktur terbatas, serta birokrasi yang belum ramah investasi. Temuan ini memberikan dorongan bahwa reformasi regulasi dan pendekatan kolaboratif dengan masyarakat adat menjadi kunci dalam memacu produktivitas investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fresiliasari dan Suhardjo di Kabupaten Sorong menambahkan perspektif penting mengenai peran pemerintah daerah dalam mengarahkan strategi investasi (Fresiliasari & Suhardjo, 2024). Studi ini menyoroti perlunya perencanaan yang berbasis data dan pengawasan intensif terhadap perizinan sebagai cara untuk mendorong investasi yang berkelanjutan. Strategi ini penting diterapkan pula dalam konteks DOB lainnya sebagai bagian dari grand design pembangunan jangka panjang.

Tidak kalah penting, Sinen, Ningrum, dan Kabes menekankan bahwa kesiapan masyarakat dalam menyambut DOB Papua Barat Daya sangat krusial (Sinen et al., 2022). Penelitian ini menekankan peran partisipasi masyarakat serta kesiapan struktur kelembagaan lokal dalam menyukseskan proses pemekaran wilayah. Hal ini mempertegas pentingnya strategi investasi yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga menumbuhkan daya inisiatif dari akar rumput.

Terakhir, Salmawati memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak kebijakan Otsus terhadap ekonomi masyarakat asli Papua (Salmawati, 2024). Mereka menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara maksud kebijakan dan hasil nyata di lapangan. Kurangnya koordinasi antara aktor kebijakan serta minimnya partisipasi masyarakat lokal menjadi penghambat utama. Studi ini mengonfirmasi bahwa strategi investasi yang revolusioner harus mampu menjembatani kesenjangan tersebut melalui model pembangunan yang kontekstual, adil, dan partisipatif.

Dari seluruh literatur yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan akselerasi investasi di Papua dan DOB sangat bergantung pada kombinasi antara reformasi kebijakan, penguatan tata kelola, peran aktif masyarakat lokal, serta komitmen nyata dari pemerintah dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan berkeadilan. Strategi revolusioner dalam konteks ini bukan berarti radikal dalam bentuk, tetapi inovatif dalam pendekatan—yakni dengan mengedepankan keberpihakan terhadap daerah tertinggal, merespons nilai-nilai lokal, dan menjadikan pembangunan sebagai proses yang inklusif serta berkelanjutan.

### **BAB III**

## METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan desain eksploratif-deskriptif. Desain ini dipilih karena sesuai untuk menggali kondisi nyata dan kompleksitas persoalan investasi di Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB), serta untuk merumuskan strategi yang kontekstual, inklusif, dan dapat diterapkan secara nyata.

Desain eksploratif bertujuan untuk menemukan variabel-variabel penting dan belum banyak diteliti terkait investasi di wilayah tertinggal, sementara desain deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis karakteristik, pola, serta tantangan dan peluang investasi berdasarkan data yang tersedia.

Tahapan desain penelitian meliputi:

1. **Identifikasi Masalah dan Penentuan Fokus**  
Menentukan isu sentral yang menjadi penghambat akselerasi investasi, seperti regulasi, infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat lokal.
2. **Penyusunan Kerangka Konseptual**  
Merancang dasar teoritis yang digunakan untuk menganalisis fenomena, termasuk teori pembangunan wilayah, model investasi daerah, dan studi kebijakan publik.
3. **Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan analisis utama sebagai berikut:

- a. **Analisis Kebijakan**  
Menilai kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang memengaruhi iklim investasi, termasuk pelaksanaan Otonomi Khusus, skema insentif fiskal, dan kebijakan pemekaran wilayah. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya, serta menemukan peluang perbaikan.
- b. **Studi Komparatif**  
Membandingkan Papua dan DOB dengan wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti Kalimantan Utara atau wilayah adat di Australia. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam menarik investasi dan membangun wilayah tertinggal.
- c. **Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)**  
Digunakan untuk memetakan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi investasi di Papua dan DOB.  
Penjabaran analisis SWOT adalah sebagai berikut:
  - **Kekuatan (Strengths):** Potensi sumber daya alam yang melimpah (pertambangan, perikanan, kehutanan), posisi strategis di Pasifik Selatan, dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat melalui dana Otonomi Khusus.

- **Kelemahan (Weaknesses):** Keterbatasan infrastruktur dasar (transportasi, energi, dan komunikasi), rendahnya kapasitas SDM lokal, serta hambatan birokrasi yang masih kuat.
  - **Peluang (Opportunities):** Keterbukaan terhadap investasi asing, insentif fiskal dan nonfiskal dari pemerintah, serta tren pembangunan hijau yang membuka peluang sektor ekonomi baru seperti energi terbarukan dan ekowisata.
  - **Ancaman (Threats):** Ketidakstabilan sosial-politik di beberapa wilayah, resistensi masyarakat terhadap investasi skala besar, serta persaingan regional dari daerah lain yang juga sedang gencar menarik investor.
- d. Hasil analisis SWOT ini menjadi dasar dalam menyusun strategi investasi yang responsif terhadap kondisi lokal dan mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan.
4. **Sintesis dan Perumusan Strategi**  
 Mengintegrasikan hasil dari ketiga metode analisis di atas untuk merumuskan strategi investasi revolusioner yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal, memperkecil ketimpangan sosial, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan desain ini, penelitian bertujuan memberikan kontribusi strategis dan praktis bagi pengambil kebijakan dan pelaku investasi dalam mempercepat pembangunan di Papua dan Daerah Otonomi Baru.

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari pentingnya ketelitian dalam mengumpulkan data sebagai fondasi utama dari kekuatan argumen yang akan disampaikan. Oleh karena itu, setiap langkah dalam pengumpulan data dirancang secara sistematis dan penuh pertimbangan, agar sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menggali strategi revolusioner investasi dalam mengakselerasi pembangunan di Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga data yang dikumpulkan bersifat tekstual dan naratif. Penulis tidak hanya mengandalkan satu jenis sumber, melainkan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data demi memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak bersifat parsial dan mampu merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Berikut uraian langkah-langkah pengumpulan data yang telah dilakukan:

#### 1. Studi Literatur

Langkah pertama yang penulis lakukan adalah menyusun kerangka topik dan mengidentifikasi fokus kajian. Dari titik ini, penulis mulai menelusuri berbagai literatur akademik yang relevan, baik dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, prosiding seminar, maupun

laporan lembaga riset. Penelusuran literatur dilakukan secara daring melalui platform ilmiah terverifikasi seperti Google Scholar, Sinta, dan portal resmi Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

Dalam proses ini, penulis tidak hanya mengumpulkan data sekunder, tetapi juga menelaahnya secara kritis. Setiap literatur dipelajari untuk menemukan benang merah, perbandingan pendekatan, dan kekosongan riset sebelumnya yang bisa menjadi pijakan untuk kontribusi karya ini. Informasi yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, seperti strategi investasi, efektivitas dana otonomi khusus, dinamika kebijakan pemekaran wilayah, dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

## **2. Dokumentasi Kebijakan**

Sebagai bentuk tanggung jawab akademik terhadap isu-isu kebijakan, penulis juga menggunakan teknik dokumentasi kebijakan. Tahap ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan DOB.

Penelusuran dokumen kebijakan dilakukan melalui situs-situs resmi pemerintah, seperti laman Kementerian Investasi, Bappenas, dan Sekretariat Kabinet. Penulis juga membaca dan mencatat kebijakan yang secara khusus membahas mekanisme insentif investasi, arah pembangunan DOB, serta tata kelola yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan.

Dari dokumen-dokumen ini, penulis menelaah bagaimana arah kebijakan dirumuskan dan sejauh mana kesesuaiannya dengan kondisi riil masyarakat. Teknik ini juga membantu penulis memahami dinamika implementasi kebijakan, termasuk tantangan dan peluang yang dapat dimaknai dalam konteks strategi investasi yang inovatif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, kedua teknik pengumpulan data ini dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan semangat untuk memahami realitas secara utuh. Penulis tidak hanya menyalin informasi, tetapi berupaya untuk mengolah dan memaknainya dalam bingkai berpikir kritis dan kontekstual. Semua langkah tersebut dirancang agar karya tulis ini tidak hanya bernilai akademik, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam wacana pembangunan daerah tertinggal di Indonesia.

## **3.3 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam karya tulis ilmiah ini bersifat kualitatif dan mendalam, dengan pendekatan sebagai berikut:

### **1. Analisis Kebijakan (Policy Analysis)**

Analisis kebijakan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Otonomi Khusus Papua, pemekaran DOB, serta insentif fiskal dan investasi yang telah diterapkan. Fokus analisis

diarahkan pada aspek implementasi, koordinasi antarpemerintah, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan ekosistem investasi yang inklusif. Studi Yuli Ariyadi dan Kusuma (2024) menunjukkan bahwa ketimpangan relasi pusat-daerah serta homogenisasi kebijakan pusat telah melemahkan efektivitas desentralisasi, termasuk dalam pengelolaan investasi.

## **2. Studi Komparatif (Comparative Study)**

Analisis komparatif digunakan untuk menilai dan membandingkan pendekatan pembangunan dan strategi investasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa, seperti Kalimantan Utara di Indonesia atau Mindanao di Filipina. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi *best practices* dalam hal kemitraan swasta-pemerintah, pemberdayaan masyarakat adat, serta skema insentif progresif yang bisa diadaptasi ke dalam konteks Papua dan DOB. Pendekatan ini didukung oleh temuan Fresiliasari & Suhardjo (2024) yang menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan pengawasan investasi di daerah pinggiran.

## **3. Analisis SWOT Kontekstual**

Analisis SWOT diterapkan untuk memetakan kekuatan (kekayaan sumber daya alam, posisi strategis), kelemahan (infrastruktur dan SDM terbatas), peluang (pemekaran wilayah, insentif baru), dan ancaman (konflik horizontal, resistensi masyarakat lokal) dalam konteks pengembangan investasi di Papua dan DOB. Data diperoleh dari studi Suriadi et al. (2024) serta laporan Bank Dunia dan BPS. SWOT ini tidak hanya menjadi alat deskriptif, tetapi juga sebagai dasar penyusunan strategi investasi berbasis realitas lokal.

## **4. Perumusan Strategi Revolusioner**

Setelah tiga tahap analisis dilakukan, hasilnya digunakan untuk merumuskan strategi investasi yang bersifat revolusioner namun adaptif terhadap kearifan lokal Papua. Strategi ini meliputi reformasi regulasi perizinan berbasis digital, pembentukan Badan Investasi Daerah yang inklusif terhadap masyarakat adat, dan kemitraan strategis dengan investor swasta dalam skema pembangunan berkelanjutan. Strategi ini dirancang tidak sekadar untuk meningkatkan nilai investasi, tetapi juga untuk menciptakan dampak sosial-ekonomi yang luas dan adil.

### **3.4 Validitas dan Keandalan Data**

**Validitas** data dalam karya tulis ini dijaga melalui penggunaan berbagai sumber kredibel dan relevan. Sumber data meliputi jurnal ilmiah nasional, laporan resmi pemerintah (Kementerian Investasi, Bappenas), publikasi dari lembaga internasional (seperti Bank Dunia), serta dokumen kebijakan Otonomi Khusus Papua. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif berdasarkan kesesuaian konteks dan tahun publikasi terkini (2023–2024), untuk memastikan keterbaruan data.

Keandalan data dijaga melalui proses triangulasi, yaitu pengujian silang antara berbagai sumber untuk menghindari bias dan memastikan konsistensi informasi. Selain itu, keandalan juga diperkuat dengan menyandingkan data kuantitatif (misalnya, statistik investasi dan kemiskinan dari BPS) dengan data kualitatif (seperti hasil analisis dari penelitian sebelumnya).



Penulis juga melakukan validasi logis dengan mencocokkan strategi yang dirumuskan terhadap hasil analisis SWOT dan kebijakan.

## **BAB IV KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, kualitatif, dan studi kasus, dapat disimpulkan bahwa percepatan investasi di Papua dan daerah otonomi baru (DOB) menghadapi tantangan struktural dan sistemik yang signifikan. Rendahnya realisasi investasi disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dasar, ketidakpastian regulasi, keterbatasan SDM lokal, serta tingginya persepsi risiko. Namun demikian, wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor sumber daya alam, agrowisata, dan energi terbarukan.

Strategi revolusioner percepatan investasi di DOB Papua harus mencakup pendekatan transformasional, yaitu melalui reformasi tata kelola, pembangunan infrastruktur konektivitas, insentif investasi berbasis wilayah, penguatan kapasitas SDM lokal, serta penerapan prinsip ESG untuk menjamin keberlanjutan. Studi kasus sukses di Papua Barat menunjukkan bahwa investasi yang berbasis kearifan lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat mampu menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang nyata.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha, percepatan investasi di DOB Papua bukan hanya memungkinkan, tetapi juga dapat menjadi fondasi penting dalam mengubah status “tertinggal” menjadi “terdepan”.

## **REFERENCES**

- Fresiliasari, O., & Suhardjo, Y. (2024). Kebijakan Strategi Investasi Daerah Kabupaten Sorong. *Solusi*, 22(3), 351. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i3.9513>
- Perbendaharaan, D. J., Keuangan, K., Jenderal, S., & Keuangan, K. (2024). *TRANSFER KE DAERAH: DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA , PERSPEKTIF INSTITUSIONAL ISOMORPHISM*. 5, 145–159.
- Purwadi, M. A., & Jamaluddin, F. D. (2020). Di Provinsi Papua. *JUMABIS (Jurnal Manajemen & Bisnis)*, 4, 35–45.
- Salmawati, S. P. A. . N. U. S. N. . R. L. . & I. S. (2024). Dampak Otonomi Khusus Pada Ekonomi Orang Asli Papua Setelah Implementasi Kebijakan Pemerintahan. *Jurnal Noken : Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 214–222. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn>
- Sinen, K., Sasmitha Ningrum, A., & Angela Kabes, O. (2022). Strategi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(2), 45–54. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i2.20844>
- Suriadi, H. S., Frinaldi, A., Putri, N. E., Asnil, A., & Nofranita, W. (2024). Optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Untuk Percepatan Pembangunan Di Provinsi Papua. *Menara Ilmu*, 18(2), 77–86. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.4954>
- Tabuni, N., Waworundeng, W., & Sampe, S. (2023). Perpektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua. *Agri-Sosioekonomi*, 19(2), 2458–2470. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i2.50131>





